



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 75 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENYAJIAN KEMBALI (*RESTATEMENT*)
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 01 mengenai Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa Laporan Keuangan disajikan secara komparatif;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! pada Pemerintah Daerah Pasal 9 yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyajikan kembali LRA, Neraca dan LAK tahun sebelumnya pada tahun pertama penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa Penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai Tahun Anggaran 2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyajian Kembali (*Restatement*) Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Tahun 2005 Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah lembaga tinggi Negara dalam sistem kenegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
3. Penyajian Kembali (*Restatement*) Laporan Keuangan adalah perlakuan akuntansi atas penyajian laporan keuangan, karena adanya perubahan estimasi akuntansi (*changes in accounting estimates*), kesalahan mendasar (*fundamental errors*), dan perubahan kebijakan akuntansi (*changes in accounting policies*).
4. Perubahan Estimasi Akuntansi (*Changes in Accounting Estimates*) adalah perubahan estimasi atas akun dalam akuntansi yang tidak dapat diukur dengan tepat, seperti piutang tidak tertagih, persediaan yang usang, nilai wajar aset tetap dan umur manfaat dari aset tetap.
5. Kesalahan Mendasar (*Fundamental Errors*) adalah kesalahan dalam laporan keuangan dapat bersifat material yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan kesalahan non material yang biasanya disengaja untuk kepentingan tertentu seperti untuk mencapai suatu penyajian laporan posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas tertentu.
6. Perubahan Kebijakan Akuntansi (*Changes in Accounting Policies*) adalah penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku.
7. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
8. SAP Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
9. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.

10. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
11. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
12. Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
13. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
14. Basis Kas Menuju Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrua.
15. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
16. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
18. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
19. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

20. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
21. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
23. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran, pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
25. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
26. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
27. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
28. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
29. Beban dibayar dimuka adalah beban yang telah dibayar namun masih memberikan manfaat di masa depan.
30. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

31. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
32. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
33. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
34. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
35. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
36. Aset lainnya - Aset yang dikerjasamakan adalah aset milik pemerintah daerah yang berstatus kemitraan dengan pihak ketiga.
37. Aset lainnya - Aset Rusak Berat/Hilang/Dalam Penelusuran adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang/dalam penelusuran atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan.
38. Kewajiban jangka pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah, jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
39. Pendapatan diterima dimuka adalah pembayaran yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah namun Pemerintah Daerah belum memiliki hak atas pembayaran yang diterima tersebut.
40. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
41. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.
42. Aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya.
43. Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

44. Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah.
45. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
46. Laporan Keuangan Komparatif adalah laporan keuangan yang menyajikan perbandingan antara komponen-komponen laporan keuangan tahun tertentu dengan tahun sebelumnya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi SKPD dalam rangka penyajian kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Tahun 2014 pada penyajian laporan keuangan Tahun 2015.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyajian kembali (*restatement*) akun-akun dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014; dan
- b. penyajian komparatif Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015.

BAB IV PENYAJIAN KEMBALI (*RESTATEMENT*) LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014

Pasal 4

- (1) Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 perlu dilakukan penyajian kembali karena terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penyajian laporan keuangan yang disebabkan oleh:
 - a. perubahan Estimasi Akuntansi (*Changes in Accounting Estimates*);
 - b. kesalahan Mendasar (*Fundamental Errors*); DAN
 - c. perubahan Kebijakan Akuntansi (*Changes in Accounting Policies*).

- (2) Untuk memberikan informasi keterbandingan laporan keuangan antar periode karena adanya perubahan estimasi akuntansi (*changes in accounting estimates*), kesalahan mendasar (*fundamental errors*), dan perubahan kebijakan akuntansi (*changes in accounting policies*) sebagaimana pada ayat (1), laporan keuangan Tahun 2015 dan tahun selanjutnya disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya.

Pasal 5

Penyajian kembali (*restatement*) Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a pada neraca, mencakup:

- a. piutang;
- b. beban dibayar dimuka;
- c. persediaan;
- d. investasi jangka panjang;
- e. aset tetap;
- f. aset tidak berwujud;
- g. aset lainnya-aset yang dikerjasamakan;
- h. aset lainnya-aset rusak berat/hilang/dalam penelusuran;
- i. kewajiban jangka pendek;
- j. ekuitas.

Pasal 6

Penyajian kembali (*restatement*) pada laporan arus kas meliputi:

- a. Reklasifikasi arus kas dari aktifitas investasi aset non keuangan ke arus kas dari aktifitas investasi.
- b. Reklasifikasi arus kas dari aktifitas pembiayaan ke arus kas dari aktifitas investasi berupa:
 - 1) Investasi/divestasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - 2) Penerimaan kembali/pengeluaran Investasi Non Permanen; dan
 - 3) Pembentukan/pencairan Dana Cadangan.
- c. Reklasifikasi arus kas dari aktifitas pembiayaan ke arus kas dari aktifitas pendanaan, berupa:
 - 1) Penerimaan Utang; dan
 - 2) Pembayaran Pokok Utang.
- d. Reklasifikasi arus kas dari aktivitas non anggaran ke arus kas dari aktifitas transitoris.

BAB V
PENYAJIAN KOMPARATIF LAPORAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Laporan keuangan Tahun 2015 yang disajikan secara komparatif dengan laporan keuangan Tahun 2014 meliputi:
 - a. Neraca;
 - b. Laporan Arus Kas; dan
 - c. Laporan Realisasi Anggaran;
- (2) Laporan keuangan Tahun 2015 yang tidak disajikan secara komparatif dengan laporan keuangan Tahun 2014 meliputi:
 - a. Laporan Operasional;
 - b. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- (3) Laporan keuangan tahun-tahun berikutnya meliputi Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, dan Laporan Arus Kas, selanjutnya disajikan secara komparatif dengan laporan tahun sebelumnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Kepala SKPKD dan Kepala SKPD bertanggung jawab atas penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan Tahun 2014 yang telah diaudit oleh BPK RI.
- (2) Inspektorat melakukan *review* atas penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan Tahun 2014 yang telah diaudit oleh BPK RI.
- (3) Langkah kerja penyajian kembali (*restatement*) Laporan Keuangan dan format Laporan Keuangan yang telah disajikan kembali (*restated*) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyajian Kembali (*restatement*) Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selain tahun 2014, dapat dilakukan jika diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 November 2015

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

H. CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 1 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 19590206 198802 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2015 NOMOR 75

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 75 TAHUN 2015 TANGGAL 30 NOVEMBER 2015
TENTANG PEDOMAN PENYAJIAN KEMBALI
(RESTATEMENT) LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014 KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

A. PENDAHULUAN

Maksud dan tujuan Penyajian Kembali Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Adanya Perubahan Kebijakan Akuntansi
Dengan diterapkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada tahun 2015, terjadi perubahan basis akuntansi dari yang sebelumnya akuntansi berbasis Kas menuju Akrual (*Cash Toward Accrual*) menjadi Akuntansi berbasis Akrual (*Accrual Basis*). Oleh sebab itu penyajian kembali (*Restatement*) perlu dilakukan.
2. Untuk Tujuan Komparatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Laporan Keuangan Tahun 2014 yang disajikan kembali akan menjadi saldo awal tahun 2015 sehingga laporan keuangan tahun 2015 dapat disajikan secara komparatif dengan laporan keuangan tahun 2014.

Jenis Laporan Keuangan yang harus disajikan kembali agar dapat mencapai tujuan komparatif adalah:

1. Neraca
Laporan keuangan yang substansinya perlu untuk di-*restated* (disajikan kembali) adalah Neraca, karena terdapat perubahan yang substansial di neraca dalam hal pemerintah daerah belum menerapkan "*full accrual basis*".
2. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas perlu disajikan kembali dalam pengelompokan jenis arus kas masuk dan keluar, karena terdapat perbedaan dalam pengelompokan jenis arus kas masuk dan arus kas keluar. Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*), maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:
 1. Piutang
Piutang perlu disajikan kembali bila neraca per 31 Desember 2014 belum menyajikan piutang dan penyisihan piutang.
 2. Beban Dibayar Dimuka
Beban Dibayar Dimuka perlu disajikan kembali bila neraca per 31 Desember 2014 belum menyajikan beban yang memberikan manfaat di masa depan sebagai beban dibayar dimuka.
 3. Persediaan
Persediaan perlu disajikan kembali bila metode penilaian persediaan pada neraca per 31 Desember 2014 menghasilkan nilai yang berbeda apabila dihitung dengan metode yang digunakan pada neraca per 31 Desember 2015.

4. **Investasi Jangka Panjang**
Investasi Jangka Panjang perlu disajikan kembali bila metode pencatatan investasi jangka panjang pada neraca per 31 Desember 2014 berbeda dengan metode yang digunakan pada neraca per 31 Desember 2015.
5. **Aset Tetap**
Aset Tetap perlu disajikan kembali dengan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku per 31 Desember 2014 dengan menggunakan metode dan tarif penyusutan yang dipakai sesuai kebijakan akuntansi Tahun 2015.
6. **Aset Tidak Berwujud**
Aset Tidak Berwujud perlu disajikan kembali dengan menyajikan nilai perolehan, akumulasi amortisasi dan nilai buku per 31 Desember 2014 dengan menggunakan metode dan tarif amortisasi yang dipakai sesuai kebijakan akuntansi Tahun 2015.
7. **Aset Lainnya - Aset yang dikerjasamakan**
Aset Lainnya - Aset yang dikerjasamakan selain tanah perlu disajikan kembali dengan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku per 31 Desember 2014 dengan menggunakan metode dan tarif penyusutan yang dipakai sesuai kebijakan akuntansi Tahun 2015.
8. **Aset Lainnya – Aset Rusak Berat/Hilang/Dalam Penelusuran**
Aset ini perlu disajikan kembali dengan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku per 31 Desember 2014 dengan menggunakan metode dan tarif penyusutan yang dipakai sesuai kebijakan akuntansi Tahun 2015. Aset ini selanjutnya dihentikan penyusutannya mulai Tahun 2015.
9. **Kewajiban Jangka Pendek**
Kewajiban Jangka Pendek perlu disajikan kembali bila neraca per 31 Desember 2014 belum menyajikan kewajiban jangka pendek yang timbul sebagai hutang yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima.
10. **Ekuitas**
Ekuitas perlu disajikan kembali karena terdapat perbedaan dalam pengklasifikasian akun ekuitas menurut kebijakan akuntansi berbasis kas menuju akrual dengan kebijakan akuntansi berbasis akrual, dan perbedaan (penurunan) nilai ekuitas sebagai dampak penyajian kembali atas akun aset dan kewajiban di atas.

B. PENYAJIAN KEMBALI (*RESTATEMENT*) LAPORAN KEUANGAN

1. TAHAPAN PENYAJIAN KEMBALI (*RESTATEMENT*) NERACA SKPD

Langkah kerja SKPD untuk penyajian kembali (*restatement*) akun-akun neraca SKPD per 31 Desember 2014 *audited* sebagai berikut:

a. Piutang

- 1) memperoleh saldo piutang per 31 Desember 2014 *audited*, BPKAD;
- 2) melakukan pencatatan dan verifikasi atas saldo piutang per 31 Desember 2014 *audited*;
- 3) melakukan identifikasi atas piutang per 31 Desember 2014 yang belum tercatat dalam saldo piutang per 31 Desember 2014 *audited*;

- 4) membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi atas perubahan saldo piutang per 31 Desember 2014 *audited* berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi;
- 5) melakukan perhitungan penyisihan piutang per 31 Desember 2014 atas saldo piutang per 31 Desember 2014 *audited* setelah verifikasi dan identifikasi sebagai dasar penyajian kembali nilai piutang dan penyisihannya;
- 6) perhitungan penyisihan piutang mengacu pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

a) penyisihan Piutang Pajak

No	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0-1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1- 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2-3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3-4 tahun	Diragukan	50%
5	Di atas 4 tahun	Macet	100%

b) penyisihan Piutang Retribusi

No	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0-1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1-2 tahun	Lancar Dengan Perhatian Khusus	10%
3	Di atas 2-3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3-4 tahun	Diragukan	50%
5	Di atas 4 tahun	Macet	100%

- c) penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi, dan piutang lainnya.

No	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0-1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1-2 tahun	Kurang Lancar	25%
3	Di atas 2-3 tahun	Diragukan	50%
4	Di atas 3 Tahun	Macet	100%

- d) penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD.

- 7) membebankan dampak dari penyajian kembali penyisihan piutang ke ekuitas.

b. Persediaan

- 1) memperoleh saldo persediaan per 31 Desember 2014 *audited* dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 2) melakukan pencatatan dan verifikasi atas saldo persediaan per 31 Desember 2014 *audited* berdasarkan *stock opname* persediaan per 31 Desember 2014 dengan menggunakan metode periodik;
- 3) mengidentifikasi persediaan per 31 Desember 2014 yang belum tercatat dalam saldo persediaan per 31 Desember 2014 *audited*;

- 4) menghitung ulang nilai persediaan persediaan dengan menggunakan kebijakan akuntansi 2015 (metode FIFO (*First In Fisrt Out*))
- 5) membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi atas perubahan saldo persediaan per 31 Desember 2014 *audited* berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi;
- 6) membebankan dampak dari penyajian kembali akun persediaan ke ekuitas.

c. Beban Dibayar Dimuka

- 1) memperoleh saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2014 *audited* dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- 2) mengidentifikasi pengeluaran belanja tahun 2014 yang mempunyai manfaat di masa depan per 31 Desember 2014, sebagai contoh beban sewa gedung, beban premi asuransi, dan lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 31 Desember 2014 (jatuh tempo/kontrak berakhir setelah 31 Desember 2014) yang belum tercatat dalam saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2014 *audited*;
- 3) membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi atas perubahan saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2014 *audited* berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi.
- 4) membebankan dampak dari penyajian kembali akun beban dibayar di muka ke ekuitas.

d. Investasi Jangka Panjang

- 1) memperoleh saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2014 *audited* dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, berupa investasi non permanen;
- 2) melakukan pencatatan dan verifikasi atas saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2014 *audited*;
- 3) mengidentifikasi investasi jangka panjang per 31 Desember 2014 yang belum tercatat dalam saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2014 *audited*;
- 4) membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi atas perubahan saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2014 *audited* berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi;
- 5) membebankan dampak dari penyajian kembali akun investasi jangka panjang ke ekuitas

e. Aset Tetap

- 1) memperoleh saldo aset tetap per 31 Desember 2014 *audited* dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 2) rekonsiliasi database SIMDA BMD dengan saldo aset tetap neraca *audited*;
- 3) melakukan pencatatan dan verifikasi atas saldo aset tetap per 31 Desember 2014 *audited*;
- 4) mengidentifikasi aset tetap per 31 Desember 2014 yang belum tercatat dalam saldo aset tetap per 31 Desember 2014 *audited*;
- 5) membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi atas perubahan saldo aset tetap per 31 Desember 2014 *audited* berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi;
- 6) rekonsiliasi perubahan saldo aset tetap per 31 Desember 2014 *audited* berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi dengan database SIMDA BMD;

- 7) melakukan perhitungan penyusutan aset tetap per 31 Desember 2014 berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut dengan menggunakan aplikasi SIMDA BMD sebagai dasar penyajian kembali nilai aset tetap dan penyusutannya;
- 8) perhitungan penyusutan aset tetap mengacu pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu dengan menggunakan metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	2	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	3	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	9	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
			28	<i>Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)</i>	10
			29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
			30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
			31	Senjata Api	10
			32	Persenjataan Non Senjata Api	3
			33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
				Gedung dan Bangunan	
			1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
			2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
			3	Bangunan Menara	40
			4	Bangunan Bersejarah	50
			5	Tugu Peringatan	50

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat
			6	Candi	50
			7	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
			8	Tugu Peringatan Lain	50
			9	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
			10	Rambu-Rambu	50
			11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
				Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
			1	Jalan	10
			2	Jembatan	50
			3	Bangunan Air Irigasi	50
			4	Bangunan Air Pasang Surut	50
			5	Bangunan Air Rawa	25
			6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
			7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
			8	Bangunan Air Bersih/Baku	40
			9	Bangunan Air Kotor	40
			10	Bangunan Air	40
			11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
			12	Instalasi Air Kotor	30
			13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
			14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
			15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
			16	Instalasi Gardu Listrik	40
			17	Instalasi Pertahanan	30
			18	Instalasi Gas	30
			19	Instalasi Pengaman	20
			20	Jaringan Air Minum	30
			21	Jaringan Listrik	40
			22	Jaringan Telepon	20
			23	Jaringan Gas	30

- 9) Perhitungan penyusutan dihitung sejak tanggal perolehannya dan tanpa nilai residu.
- 10) Hasil perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap dicatat sebagai akumulasi penyusutan dan mengurangi nilai tercatat aset tetap tersebut.
- 11) Hasil perhitungan ulang akumulasi penyusutan dibebankan ke ekuitas.

f. Aset Tidak Berwujud

- 1) Memperoleh saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2014 *audited* dari BPKAD;
- 2) Rekonsiliasi database SIMDA BMD dengan saldo aset tidak berwujud neraca *audited*;
- 3) Melakukan pencatatan dan verifikasi atas saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2014 *audited*;
- 4) Mengidentifikasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2014 yang belum tercatat dalam saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2014 *audited*;
- 5) Membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi atas perubahan saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2014 *audited* berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi;

- 6) Rekonsiliasi perubahan saldo tidak berwujud per 31 Desember 2014 *audited* berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi dengan database SIMDA BMD;
- 7) Melakukan perhitungan amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2014 atas saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2014 *audited* berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut dengan menggunakan aplikasi SIMDA BMD sebagai dasar penyajian kembali nilai aset tidak berwujud dan amortisasinya;
- 8) Perhitungan amortisasi aset tidak berwujud mengacu pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu diamortisasi secara garis lurus;
- 9) Membebankan dampak dari penyajian kembali akun aset tidak berwujud ke ekuitas.

g. Aset Lainnya - Aset yang Dikerjasamakan

- 1) Memperoleh saldo aset lainnya - aset yang dikerjasamakan per 31 Desember 2014 *audited* dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 2) Rekonsiliasi database SIMDA BMD dengan saldo aset lainnya - aset yang dikerjasamakan neraca *audited*;
- 3) Melakukan pencatatan dan verifikasi atas saldo aset lainnya - aset yang dikerjasamakan per 31 Desember 2014 *audited*;
- 4) Mengidentifikasi aset lainnya - aset yang dikerjasamakan per 31 Desember 2014 yang belum tercatat dalam saldo aset tetap per 31 Desember 2014 *audited*;
- 5) Membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi atas perubahan saldo aset lainnya - aset yang dikerjasamakan per 31 Desember 2014 *audited* berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi;
- 6) Rekonsiliasi perubahan saldo aset lainnya - aset yang dikerjasamakan per 31 Desember 2014 *audited* berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi dengan database SIMDA BMD;
- 7) Melakukan perhitungan penyusutan aset lainnya - aset yang dikerjasamakan per 31 Desember 2014 atas saldo aset tetap per 31 Desember 2014 *audited* berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut dengan menggunakan aplikasi SIMDA BMD sebagai dasar penyajian kembali nilai aset aset lainnya - aset yang dikerjasamakan dan penyusutannya;
- 8) Perhitungan penyusutan aset lainnya - aset yang dikerjasamakan mengacu pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana perhitungan penyusutan pada aset tetap.
- 9) Membebankan dampak dari penyajian kembali akun aset lainnya-aset dikerjasamakan ke ekuitas.

h. Aset Lainnya – Aset Rusak Berat/Hilang/Dalam Penelusuran

- 1) Memperoleh saldo aset lainnya - aset rusak berat/hilang/ dalam penelusuran per 31 Desember 2014 *audited* dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 2) Rekonsiliasi database SIMDA BMD dengan saldo aset lainnya - aset rusak berat/hilang/dalam penelusuran neraca *audited*;
- 3) Melakukan pencatatan dan verifikasi atas saldo aset lainnya - aset rusak berat/hilang/dalam penelusuran per 31 Desember 2014 *audited*;

- 4) Mengidentifikasi aset lainnya - aset rusak berat/hilang/dalam penelusuran per 31 Desember 2014 yang belum tercatat dalam saldo aset lainnya - aset rusak berat/hilang/dalam penelusuran per 31 Desember 2014 *audited*;
- 5) Membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi atas perubahan saldo aset lainnya - aset rusak berat/hilang/dalam penelusuran per 31 Desember 2014 *audited* berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi;
- 6) Rekonsiliasi perubahan saldo aset lainnya - aset rusak berat/hilang/dalam penelusuran per 31 Desember 2014 *audited* berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi dengan database SIMDA BMD;
- 7) Melakukan perhitungan penyusutan aset lainnya - aset rusak berat/hilang/dalam penelusuran per 31 Desember 2014 atas saldo aset lainnya - aset rusak berat/hilang/dalam penelusuran per 31 Desember 2014 *audited* berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut dengan menggunakan aplikasi SIMDA BMD sebagai dasar penyajian kembali nilai aset lainnya - aset rusak berat/hilang/dalam penelusuran dan penyusutannya;
- 8) Perhitungan penyusutan aset lainnya - aset rusak berat/hilang/dalam penelusuran mengacu pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana perhitungan penyusutan pada aset lainnya.
- 9) Membebankan dampak dari penyajian kembali akun persediaan ke ekuitas.

i. Kewajiban Jangka Pendek

- 1) Memperoleh saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2014 *audited* dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, berupa utang pihak ketiga, utang PFK, dan utang jangka pendek lainnya;
- 2) Melakukan pencatatan dan verifikasi atas kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2014 *audited*;
- 3) Mengidentifikasi kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2014 yang belum tercatat dalam saldo kewajiban jangka pendek penelusuran per 31 Desember 2014 *audited*;
- 4) Membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi atas perubahan kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2014 *audited* berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi.
- 5) Membebankan dampak dari penyajian kembali akun kewajiban jangka pendek ke ekuitas.

j. Ekuitas

- 1) Memperoleh saldo ekuitas per 31 Desember 2014 *audited* dari SKPD;
- 2) Melakukan pencatatan dan verifikasi atas ekuitas per 31 Desember 2014 *audited*;
- 3) Menggabungkan ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan dalam akun ekuitas.
- 4) Menginventarisir dampak penyajian kembali seluruh akun neraca yang berdampak terhadap ekuitas;
- 5) Membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi atas perubahan saldo ekuitas per 31 Desember 2014 *audited* berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi dampak penyajian kembali akun neraca yang lain.

- 1) Mengetahui saldo rekening aset lainnya - aset tetap pada tanggal 31 Desember 2014 yang belum tercatat dalam saldo aset lainnya - aset tetap pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:
- 2) Mengetahui saldo tambah dan kurang aset tetap lainnya - aset tetap pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:
- 3) Mengetahui saldo tambah dan kurang aset tetap lainnya - aset tetap pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:
- 4) Mengetahui saldo tambah dan kurang aset tetap lainnya - aset tetap pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:
- 5) Mengetahui saldo tambah dan kurang aset tetap lainnya - aset tetap pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:
- 6) Mengetahui saldo tambah dan kurang aset tetap lainnya - aset tetap pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:
- 7) Mengetahui saldo tambah dan kurang aset tetap lainnya - aset tetap pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:
- 8) Mengetahui saldo tambah dan kurang aset tetap lainnya - aset tetap pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:
- 9) Mengetahui saldo tambah dan kurang aset tetap lainnya - aset tetap pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:
- 10) Mengetahui saldo tambah dan kurang aset tetap lainnya - aset tetap pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:

1. Kewajiban jangka panjang

- 1) Mengetahui saldo kewajiban jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:
- 2) Mengetahui saldo kewajiban jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:
- 3) Mengetahui saldo kewajiban jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:
- 4) Mengetahui saldo kewajiban jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:
- 5) Mengetahui saldo kewajiban jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:
- 6) Mengetahui saldo kewajiban jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:
- 7) Mengetahui saldo kewajiban jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:
- 8) Mengetahui saldo kewajiban jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:
- 9) Mengetahui saldo kewajiban jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:
- 10) Mengetahui saldo kewajiban jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:

2. Ekuitas

- 1) Mengetahui saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:
- 2) Mengetahui saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:
- 3) Mengetahui saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:
- 4) Mengetahui saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:
- 5) Mengetahui saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:
- 6) Mengetahui saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:
- 7) Mengetahui saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:
- 8) Mengetahui saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:
- 9) Mengetahui saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:
- 10) Mengetahui saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 untuk:

Akun-akun neraca yang di-*restated* atau disajikan kembali adalah akun-akun neraca yang berdasarkan saldo akhir neraca per 31 Desember 2014 *audited*. Selanjutnya SKPD menyajikan mutasi tambah dan kurang.

Penjelasan atas mutasi tambah dan kurang atau perbedaan antara neraca per 31 Desember 2014 *audited* dengan neraca per 31 Desember 2014 *restated*, dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan (Neraca) per 31 Desember 2014 *restated*.

2. TAHAPAN PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA PEMERINTAH DAERAH

Langkah kerja SKPKD untuk penyajian kembali (*restatement*) akun-akun neraca PPKD per 31 Desember 2014 *audited* sebagai berikut:

- a. Mendistribusikan neraca SKPD per 31Desember 2014 *audited* ke seluruh SKPD sebagai dasar atau bahan SKPD memulai langkah kerja penyajian kembali (*restatement*) akun-akun neraca;
- b. Melakukan verifikasi atas penyajian kembali (*restatement*) akun-akun neraca SKPD per 31 Desember 2014 *audited* yang telah dibuat oleh SKPD;
- c. Melakukan penyajian kembali atas neraca PPKD per 31Desember 2014 *audited*, sebagai berikut:

1) Piutang

- a) Memperoleh saldo piutang per 31 Desember 2014 *audited*, berupa piutang dana bagi hasil dan piutang dana alokasi khusus;
- b) Melakukan pencatatan dan verifikasi atas saldo piutang per 31 Desember 2014 *audited*;
- c) Melakukan identifikasi atas piutang per 31 Desember 2014 yang belum tercatat dalam saldo piutang per 31 Desember 2014 *audited*;
- d) Membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi atas perubahan saldo piutang per 31 Desember 2014 *audited* berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi;
- e) Melakukan perhitungan penyisihan piutang per 31 Desember 2014 atas saldo piutang per 31 Desember 2014 *audited* setelah verifikasi dan identifikasi sebagai dasar penyajian kembali nilai piutang dan penyisihannya;
- f) Perhitungan penyisihan piutang mengacu pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi, dan piutang lainnya, yaitu:

No	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Kurang Lancar	25%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Diragukan	50%
4	Diatas 3 Tahun	Macet	100%

2) Investasi Jangka Panjang

- a) Memperoleh saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2014 *audited* dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, berupa investasi non permanen dan investasi permanen;
- b) Melakukan pencatatan dan verifikasi atas saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2014 *audited*;
- c) Mengidentifikasi investasi jangka panjang per 31 Desember 2014 yang belum tercatat dalam saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2014 *audited*;
- d) Membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi atas perubahan saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2014 *audited* berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi;

3) Aset Lainnya - Aset yang Dikerjasamakan

- a) Memperoleh saldo aset lainnya-aset yang dikerjasamakan per 31 Desember 2014 *audited*;
- b) Melakukan pencatatan dan verifikasi atas saldo aset lainnya-aset yang dikerjasamakan per 31 Desember 2014 *audited*;
- c) Mengidentifikasi aset lainnya – aset yang dikerjasamakan per 31 Desember 2014 yang belum tercatat dalam saldo aset tetap per 31 Desember 2014 *audited*;
- d) Membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi atas perubahan saldo aset lainnya – aset yang dikerjasamakan per 31 Desember 2014 *audited* berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi;
- e) Melakukan perhitungan penyusutan aset lainnya – aset yang dikerjasamakan per 31 Desember 2014 atas saldo aset tetap per 31 Desember 2014 *audited* berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi sebagai dasar penyajian kembali nilai aset aset lainnya – aset yang dikerjasamakan dan penyusutannya;
- f) Perhitungan penyusutan aset lainnya – aset yang dikerjasamakan mengacu pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana perhitungan penyusutan pada aset tetap.

4) Kewajiban Jangka Pendek

- a) Memperoleh saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2014 *audited* dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, berupa utang PFK, utang pihak ketiga dan utang jangka pendek lainnya.
- b) Melakukan pencatatan dan verifikasi atas kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2014 *audited*;
- c) Mengidentifikasi kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2014 yang belum tercatat dalam saldo kewajiban jangka pendek penelusuran per 31 Desember 2014 *audited*;
- d) Membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi atas perubahan kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2014 *audited* berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi.

5) **Ekuitas**

- a) Memperoleh saldo ekuitas per 31 Desember 2014 audited;
- b) Melakukan pencatatan dan verifikasi atas ekuitas per 31 Desember 2014 audited;
- c) Mengidentifikasi ekuitas per 31 Desember 2014 yang belum tercatat dalam saldo ekuitas per 31 Desember 2014 audited;
- d) Membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi atas perubahan saldo ekuitas per 31 Desember 2014 audited berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi.

Setelah saldo akhir akun-akun neraca per 31 Desember 2014 *audited* setelah penyajian kembali (*restatement*) telah selesai, selanjutnya menyajikan neraca per 31 Desember 2014 audited, mutasi tambah dan kurang serta neraca per 31 Desember 2014 audited yang telah disajikan kembali (*restated*).

Penjelasan atas mutasi tambah dan kurang atau perbedaan antara neraca per 31 Desember 2014 audited dengan neraca per 31 Desember 2014 *audited* yang telah disajikan kembali (*restated*), dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan (Neraca) per 31 Desember 2014 *Restated*.

SKPKD mengkonsolidasi neraca per 31 Desember 2014 *audited*, mutasi tambah dan kurang, dan neraca per 31 Desember 2014 audited yang telah disajikan kembali (*restated*) SKPKD dan seluruh SKPD, serta mengkonsolidasi penjelasan mutasi tambah dan kurang pada Catatan atas Laporan Keuangan (Neraca) per 31 Desember 2014 *restated*.

3. **PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH DAERAH**

Laporan Arus Kas perlu dilakukan penyajian kembali dalam hal reklasifikasi pengelompokan jenis arus kas masuk dan keluar sebagai berikut:

No	No PP 24/2005		PP 71/2010
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	→	Arus Kas dari Aktivitas Operasi
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	→	Arus Kas dari Aktivitas Investasi
3	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	↘	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
4	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	→	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Beberapa hal penting terkait dengan penyajian kembali arus kas adalah sebagai berikut:

- a) Reklasifikasi dari arus kas aktifitas pembiayaan ke aktivitas investasi berupa:
 - (1) Investasi/Divestasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - (2) Penerimaan Kembali/Pengeluaran Investasi Non Permanen;
 - (3) Pembentukan/Pencairan Dana Cadangan.

b) Reklasifikasi dari Aktifitas Pembiayaan ke Aktifitas Pendanaan:

- (1) Penerimaan Utang;
- (2) Pembayaran Pokok Utang.

Langkah kerja SKPKD untuk penyajian kembali (*restatement*) akun-akun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah per 31 Desember 2014 *audited* sebagai berikut:

- a) Memperoleh saldo akun-akun Laporan Arus Kas per 31 Desember 2014 *audited*;
- b) Melakukan reklasifikasi atas saldo akun-akun Laporan Arus Kas per 31 Desember 2014 *audited* sesuai PP 71 Tahun 2010;
- c) Menyajikan Laporan Arus Kas per 31 Desember 2014 *restated* (yang telah disajikan kembali).

C. PENYAJIAN KOMPARATIF ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD DAN PEMERINTAH DAERAH

Laporan keuangan SKPD Tahun 2015 yang disajikan komparatif dengan laporan keuangan Tahun 2014 yang telah direstated adalah:

- a. Neraca
- b. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan keuangan SKPKD dan Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang disajikan komparatif dengan laporan keuangan Tahun 2014 yang telah direstated adalah:
 - a. Neraca
 - b. Laporan Realisasi Anggaran
 - c. Laporan Arus Kas

Agar Laporan Keuangan SKPD/SKPKD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 dapat disajikan komparatif dengan Laporan Keuangan *restated*, maka langkah kerja yang dilakukan sebagai berikut:

1. SKPD melakukan input saldo awal Neraca pada SIMDA Keuangan Tahun 2015 menggunakan data Neraca per 31 Desember 2014 *restated*.
2. SKPKD melakukan input saldo awal Neraca pada SIMDA Keuangan Tahun 2015 menggunakan data Neraca per 31 Desember 2014 *restated*.
3. SKPKD melakukan input saldo awal LAK pada SIMDA Keuangan Tahun 2015 menggunakan data LAK per 31 Desember 2014 *restated*.

PJ. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

H. CHAIRIL ANWAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605200212 1 002

URAIAN	Audited 2014	Tambah	Kurang	Restated 2014
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Di Kas Daerah	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Kas Di Bendahara Pemerintah	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Kas Di Bendahara Pengeluaran	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Investasi Jangka Pendek	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Pinjaman Pajak	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Pinjaman Retribusi	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Pinjaman Dana Bagi Hasil	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Pinjaman Dana Alokasi Umum	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Pinjaman Dana Alokasi Khusus	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Penyisihan Pinjaman	(XXXXXX)	(XXXXXX)	(XXXXXX)	(XXXXXX)
Pinjaman Lain-lain	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Persediaan	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Belanja dibayar dimuka	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
JUMLAH ASET LANCAR	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Non Permanen				
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Investasi Dalam Surat Utang Negara	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Investasi Non Permanen Lainnya	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
JUMLAH Investasi Non Permanen	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Investasi Permanen				
Pinjaman Modal Pemerintah Daerah	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Pinjaman Modal Dalam Proyek Pembangunan	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Pinjaman Modal Perusahaan Patungan	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Investasi Permanen Lainnya	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
JUMLAH Investasi Permanen	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
ASET TETAP				
Tanah	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Peralatan dan Mesin	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Gedung dan Bangunan	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Jalan, Jembatan dan Instalasi	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Aset Tetap Lainnya	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Konstruksi Dalam Pengerjaan	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Akumulasi Penyusutan	0.00	0.00	XXXXXX	XXXXXX
JUMLAH ASET TETAP-net	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
DANA CADANGAN				
Dana Cadangan	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
JUMLAH DANA CADANGAN	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
ASET LAINNYA				
Tagihan Piutang Penjualan Anggaran	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Tagihan Untutan Ganti Kerugian Daerah	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Komitmen Dengan Pihak Ketiga	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Aset Tidak Berwujud	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Aset Lain-lain	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
JUMLAH ASET LAINNYA	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
KEMAJIBAN				
KEMAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Utang Bunga	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Utang Pajak	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Bank	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Obligasi	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Pusat	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Provinsi	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Utang Kepada Pihak Ketiga	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Utang Transfer	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Utang Jangka Pendek Lainnya	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
JUMLAH KEMAJIBAN JANGKA PENDEK	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

URAIAN	2014 Audited	Tambah	Kurang	2014 Restated
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Dalam Negeri-Obligasi	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Pemerintah Pusat	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Pemerintah Provinsi	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Dalam Negeri - Jaminan Rekamasi	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Dalam Negeri - Jaminan Keselamatan	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
KEUTAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA)	XXXXXXXX		XXXXXXXX	0.00
Cadangan Untuk Piutang	XXXXXXXX		XXXXXXXX	0.00
Cadangan Untuk Persediaan	XXXXXXXX		XXXXXXXX	0.00
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	XXXXXXXX		XXXXXXXX	0.00
Pendapatan yang Diangguhkan	XXXXXXXX		XXXXXXXX	0.00
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	XXXXXXXX		XXXXXXXX	0.00
EKUITAS DANA INVESTASI				0
Dimvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	XXXXXXXX		XXXXXXXX	0.00
Dimvestasikan Dalam Aset Tetap	XXXXXXXX		XXXXXXXX	0.00
Dimvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	XXXXXXXX		XXXXXXXX	0.00
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	XXXXXXXX		XXXXXXXX	0.00
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	XXXXXXXX		XXXXXXXX	0.00
EKUITAS DANA CADANGAN				
Dimvestasikan Dalam Dana Cadangan	XXXXXXXX		XXXXXXXX	0.00
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	XXXXXXXX		XXXXXXXX	0.00
JUMLAH EKUITAS DANA	XXXXXXXX		XXXXXXXX	0.00
EKUITAS				XXXXXXXX
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (EKUITAS DANA)	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX

Tenggatong, Desember 2015
 BUPATI,

.....



(Dalam Rupiah)

URAIAN			Audited 2014	Restated 2014
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Di Kas Daerah			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Kas Di Bendahara Penerimaan			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Kas Di Bendahara Pengeluaran			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Investasi Jangka Pendek			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Piutang Pajak			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Piutang Retribusi			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Piutang Dana Bagi Hasil			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Piutang Dana Alokasi Umum			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Piutang Dana Alokasi Khusus			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusa			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Penyisihan Piutang			(XXXXXXXX)	(XXXXXXXX)
Piutang Lain-lain			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Persediaan			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Belanja dibayar dimuka			XXXXXXXX	XXXXXXXX
JUMLAH ASET LANCAR			XXXXXXXX	XXXXXXXX
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Non Permanen				
Pinjaman kepada Perusahaan Negara			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Investasi Dalam Surat Utang Negara			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Investasi Non Permanen Lainnya			XXXXXXXX	XXXXXXXX
JUMLAH Investasi Non Permanen			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Investasi Permanen				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Investasi Permanen Lainnya			XXXXXXXX	XXXXXXXX
JUMLAH Investasi Permanen			XXXXXXXX	XXXXXXXX
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG			XXXXXXXX	XXXXXXXX
ASET TETAP				
Tanah			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Peralatan dan Mesin			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Gedung dan Bangunan			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Jalan, Jaringan dan Instalasi			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Aset Tetap Lainnya			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Konstruksi Dalam Pengerjaan			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Akumulasi Penyusutan			XXXXXXXX	XXXXXXXX
JUMLAH ASET TETAP			XXXXXXXX	XXXXXXXX
DANA CADANGAN				
Dana Cadangan			XXXXXXXX	XXXXXXXX
JUMLAH DANA CADANGAN			XXXXXXXX	XXXXXXXX
ASET LAINNYA				
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Aset Tidak Berwujud			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Aset Lain-lain			XXXXXXXX	XXXXXXXX
JUMLAH ASET LAINNYA			XXXXXXXX	XXXXXXXX
JUMLAH ASET			XXXXXXXX	XXXXXXXX
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Bunga			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Pajak			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Bank			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Obligasi			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Pusat			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Provinsi			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Kabupaten/Kota			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Kepada Pihak Ketiga			XXXXXXXX	XXXXXXXX

URAIAN			Audited 2014	Restated 2014
Utang Transfer			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Jangka Pendek Lainnya			XXXXXXXX	XXXXXXXX
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			XXXXXXXX	XXXXXXXX
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Dalam Negeri-Obligasi			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Pemerintah Pusat			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Pemerintah Provinsi			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Pemerintah Kabupaten/Kota			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Dalam Negeri - Jaminan Rekamasi			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Dalam Negeri - Jaminan Kesugruhan			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Dalam Negeri - Jaminan Kesehatan Masyarakat			XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan			XXXXXXXX	XXXXXXXX
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			XXXXXXXX	XXXXXXXX
JUMLAH KEWAJIBAN			XXXXXXXX	XXXXXXXX
EKUITAS				XXXXXXXX
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			XXXXXXXX	XXXXXXXX

Tenggarong, Desember 2015
 BUPATI,

.....



NERACA
.....**NAMA SKPD**.....
Per 31 Desember 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2014 Audited	2014 Restated
ASET		
ASET LANCAR		
Kas Di Kas Daerah	XXXXXXX	XXXXXXX
Kas Di Bendahara Penerimaan	XXXXXXX	XXXXXXX
Kas Di Bendahara Pengeluaran	XXXXXXX	XXXXXXX
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	XXXXXXX	XXXXXXX
Investasi Jangka Pendek	XXXXXXX	XXXXXXX
Piutang Pajak	XXXXXXX	XXXXXXX
Piutang Retribusi	XXXXXXX	XXXXXXX
Piutang Dana Bagi Hasil	XXXXXXX	XXXXXXX
Piutang Dana Alokasi Umum	XXXXXXX	XXXXXXX
Piutang Dana Alokasi Khusus	XXXXXXX	XXXXXXX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusda	XXXXXXX	XXXXXXX
Penyisihan Piutang	(XXXXXXX)	(XXXXXXX)
Piutang Lain-lain	XXXXXXX	XXXXXXX
Persediaan	XXXXXXX	XXXXXXX
Belanja dibayar dimuka	XXXXXXX	XXXXXXX
JUMLAH ASET LANCAR	XXXXXXX	XXXXXXX
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	XXXXXXX	XXXXXXX
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	XXXXXXX	XXXXXXX
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	XXXXXXX	XXXXXXX
Investasi Dalam Surat Utang Negara	XXXXXXX	XXXXXXX
Investasi Non Permanen Lainnya	XXXXXXX	XXXXXXX
JUMLAH Investasi Non Permanen	XXXXXXX	XXXXXXX
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXXXXXX	XXXXXXX
Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan	XXXXXXX	XXXXXXX
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	XXXXXXX	XXXXXXX
Invertasi Permanen Lainnya	XXXXXXX	XXXXXXX
JUMLAH Investasi Permanen	XXXXXXX	XXXXXXX
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	XXXXXXX	XXXXXXX
ASET TETAP		
Tanah	XXXXXXX	XXXXXXX
Peralatan dan Mesin	XXXXXXX	XXXXXXX
Gedung dan Bangunan	XXXXXXX	XXXXXXX
Jalan, Jaringan dan Instalasi	XXXXXXX	XXXXXXX
Aset Tetap Lainnya	XXXXXXX	XXXXXXX
Konstruksi Dalam Pengerjaan	XXXXXXX	XXXXXXX
Akumulasi Penyusutan	XXXXXXX	XXXXXXX
JUMLAH ASET TETAP	XXXXXXX	XXXXXXX
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	XXXXXXX	XXXXXXX
JUMLAH DANA CADANGAN	XXXXXXX	XXXXXXX
ASET LAINNYA		
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	XXXXXXX	XXXXXXX
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	XXXXXXX	XXXXXXX
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	XXXXXXX	XXXXXXX
Aset Tidak Berwujud	XXXXXXX	XXXXXXX
Aset Lain-lain	XXXXXXX	XXXXXXX
JUMLAH ASET LAINNYA	XXXXXXX	XXXXXXX
JUMLAH ASET	XXXXXXX	XXXXXXX

URAIAN	2014 Audited	2014 Restated
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Bunga	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Pajak	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Bank	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Obligasi	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Pusat	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Provinsi	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Kepada Pihak Ketiga	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Transfer	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Jangka Pendek Lainnya	XXXXXXXX	XXXXXXXX
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	XXXXXXXX	XXXXXXXX
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Dalam Negeri-Obligasi	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Pemerintah Pusat	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Pemerintah Provinsi	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Dalam Negeri - Jaminan Reklamasi	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Dalam Negeri - Jaminan Kesungguhan	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Dalam Negeri - Jaminan Kesehatan Masyarakat	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan	XXXXXXXX	XXXXXXXX
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	XXXXXXXX	XXXXXXXX
JUMLAH KEWAJIBAN	XXXXXXXX	XXXXXXXX
EKUITAS		XXXXXXXX
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (EKUITAS DANA)	XXXXXXXX	XXXXXXXX

Tenggarong, Desember 2015
Kepala SKPD

.....



URAIAN				2014	Audited	Tambah	Kurang	Restated
ASET								
ASET LANCAR								
Kas Di Kas Daerah				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Kas Di Bendahara Pemerintahan				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Kas Di Bendahara Pengeluaran				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Investasi Jangka Pendek				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Piutang Pajak				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Piutang Retribusi				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Piutang Dana Bagi Hasil				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Piutang Dana Alokasi Umum				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Piutang Dana Alokasi Khusus				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusa				XXXXXX	XXXXXX	(XXXXXX)	(XXXXXX)	(XXXXXX)
Penyisihan Piutang				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Piutang Lain-lain				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Persediaan				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Belanja dibayar dimuka				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
JUMLAH ASET LANCAR				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
INVESTASI JANGKA PANJANG								
Investasi Non Permanen								
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah lainnya				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Investasi Dalam Surat Utang Negara				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Investasi Non Permanen Lainnya				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
JUMLAH Investasi Non Permanen				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Investasi Permanen								
Penyerahan Modal Pemerintah Daerah				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Penyerahan Modal Dalam Proyek Pembangunan				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Penyerahan Modal Perusahaan Lainnya				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Investasi Permanen Lainnya				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
JUMLAH Investasi Permanen				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
ASET TETAP								
Tanah				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Peralatan dan Mesin				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Gedung dan Bangunan				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Jalan, Jembatan dan Instalasi				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Aset Tetap Lainnya				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Konstruksi Dalam Pengadaan				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Akumulasi Penyusutan				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
JUMLAH ASET TETAP				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
DANA CADANGAN								
Dana Cadangan				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
JUMLAH DANA CADANGAN				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
ASET LAINNYA								
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Kemiran Dengan Pihak Ketiga				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Aset Tidak Berwujud				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Aset Lain-lain				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
JUMLAH ASET LAINNYA				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
KEWAJIBAN								
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK								
Utang Pembiayaan Pihak Ketiga (PFK)				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Utang Bunga				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Utang Pajak				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Bank				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Obligasi				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Pusat				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Provinsi				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Kabupaten/Kota				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Utang Kepada Pihak Ketiga				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Utang Transfer				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Utang Jangka Pendek Lainnya				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG								
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Utang Dalam Negeri-Sektor Obligasi				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Utang Pemerintah Pusat				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Utang Pemerintah Provinsi				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Utang Pemerintah Kabupaten/Kota				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Utang Dalam Negeri - Jaminan Reklamas				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Utang Dalam Negeri - Jaminan Kesugruhan				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Utang Dalam Negeri - Jaminan Kesehatan Masyarakat				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan				XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
JUMLAH KEWAJIBAN				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

URAIAN	2014 Audited	Tambah	Kurang	2014 Restated
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	XXXXXXXX		XXXXXXXX	0.00
Cadangan Untuk Piutang	XXXXXXXX		XXXXXXXX	0.00
Cadangan Untuk Persediaan	XXXXXXXX		XXXXXXXX	0.00
Dana yang Harus Disiapkan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	XXXXXXXX		XXXXXXXX	0.00
Pendapatan yang Ditangguhkan	XXXXXXXX		XXXXXXXX	0.00
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	XXXXXXXX		XXXXXXXX	0.00
EKUITAS DANA INVESTASI				
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	XXXXXXXX		XXXXXXXX	0.00
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	XXXXXXXX		XXXXXXXX	0.00
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	XXXXXXXX		XXXXXXXX	0.00
Dana yang Harus Disiapkan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	XXXXXXXX		XXXXXXXX	0.00
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	XXXXXXXX		XXXXXXXX	0.00
EKUITAS DANA CADANGAN				
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	XXXXXXXX		XXXXXXXX	0.00
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	XXXXXXXX		XXXXXXXX	0.00
JUMLAH EKUITAS DANA	XXXXXXXX		XXXXXXXX	0.00
EKUITAS		XXXXXXXX		XXXXXXXX
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (EKUITAS DANA)	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX

Tenggarong, Desember 2015
Kepala SKPD

.....



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2014

URAIAN	CATATAN	SALDO 2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.3.1	
Arus Kas Masuk :		
Pajak Daerah		xxxxxxxxxx
Retribusi Daerah		xxxxxxxxxx
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		xxxxxxxxxx
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		xxxxxxxxxx
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		xxxxxxxxxx
Dana Alokasi Umum		xxxxxxxxxx
Dana Alokasi Khusus		xxxxxxxxxx
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		xxxxxxxxxx
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		xxxxxxxxxx
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		xxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxxx
Arus Kas Keluar :		
Belanja Pegawai		xxxxxxxxxx
Belanja Barang dan Jasa		xxxxxxxxxx
Belanja Subsidi		xxxxxxxxxx
Belanja Hibah		xxxxxxxxxx
Belanja Bantuan Sosial		xxxxxxxxxx
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		xxxxxxxxxx
Belanja Tidak Terduga		xxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxxx
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		xxxxxxxxxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN	5.3.2	
Arus Kas Masuk :		
Penjualan Aset Pemda yang Tidak Digunakan		xxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxxx
Arus Kas Keluar :		
Belanja Modal Tanah		xxxxxxxxxx
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		xxxxxxxxxx
Belanja Modal Bangunan dan Gedung		xxxxxxxxxx
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		xxxxxxxxxx
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		xxxxxxxxxx
Belanja Modal Aset Lainnya		xxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxxx
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</i>		xxxxxxxxxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.3.3	
Arus Kas Masuk :		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		xxxxxxxxxx
Penerimaan Piutang Daerah		xxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxxx
Arus Kas Keluar :		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		xxxxxxxxxx
Pembayaran Pokok Utang		xxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxxx
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</i>		xxxxxxxxxx



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN ARUS KAS (RESTATED)
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2014

URAIAN	CATATAN	SALDO 2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.3.1	
Arus Kas Masuk :		
Pajak Daerah		xxxxxxxxxx
Retribusi Daerah		xxxxxxxxxx
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		xxxxxxxxxx
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		xxxxxxxxxx
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		xxxxxxxxxx
Dana Alokasi Umum		xxxxxxxxxx
Dana Alokasi Khusus		xxxxxxxxxx
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		xxxxxxxxxx
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		xxxxxxxxxx
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		xxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxxx
Arus Kas Keluar :		
Belanja Pegawai		xxxxxxxxxx
Belanja Barang dan Jasa		xxxxxxxxxx
Belanja Subsidi		xxxxxxxxxx
Belanja Hibah		xxxxxxxxxx
Belanja Bantuan Sosial		xxxxxxxxxx
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		xxxxxxxxxx
Belanja Tidak Terduga		xxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxxx
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		xxxxxxxxxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN	5.3.2	
Arus Kas Masuk :		
Penjualan Aset Pemda yang Tidak Digunakan		xxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxxx
Arus Kas Keluar :		
Belanja Modal Tanah		xxxxxxxxxx
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		xxxxxxxxxx
Belanja Modal Bangunan dan Gedung		xxxxxxxxxx
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		xxxxxxxxxx
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		xxxxxxxxxx
Belanja Modal Aset Lainnya		xxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxxx
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</i>		xxxxxxxxxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.3.3	
Arus Kas Masuk :		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		xxxxxxxxxx
Penerimaan Piutang Daerah		xxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxxx
Arus Kas Keluar :		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		xxxxxxxxxx
Pembayaran Pokok Utang		xxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxxx
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</i>		xxxxxxxxxx

URAIAN	CATATAN	SALDO 2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN	5.3.4	
Arus Kas Masuk :		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) BUD Tahun Berjalan		xxxxxxxxxxx
PFK BLUD belum disetor		xxxxxxxxxxx
Titipan Pihak Ke-3 berupa SP2D Blm Dicairkan di Kasda		xxxxxxxxxxx
Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya (setelah dikurangi PFK)		xxxxxxxxxxx
Penerimaan Kembali Kesalahan Pendebetan Bank		xxxxxxxxxxx
Penerimaan yang berasal dari piutang PFK (pengembalian SP2D yang double Pencairan 2014)		xxxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxx
Arus Kas Keluar :		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) BUD Tahun Berjalan		xxxxxxxxxxx
Kas Bendahara Pengeluaran Tahun berjalan (setelah dikurangi PFK)		xxxxxxxxxxx
SP2D 2013 yang Cair di 2014 (dikurang SP2D Ganda 2014)		xxxxxxxxxxx
Pendebetan SP2D Batal dan Pendebetan Ganda		xxxxxxxxxxx
Setoran PFK BLUD		xxxxxxxxxxx
Kesalahan Bank dalam melakukan debit rekening		xxxxxxxxxxx
PFK yang telah diakui sebagai pendapatan		xxxxxxxxxxx
Dana yang berasal dari kapitasi BPJS		xxxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxx
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		xxxxxxxxx
Kenaikan / Penurunan Kas	5.3.5	xxxxxxxxxxx
Saldo Awal Kas BUD dan BLUD		xxxxxxxxxxx
Saldo Akhir Kas BUD dan BLUD	5.3.6	xxxxxxxxxxx
Terdiri dari:		
Kas di Kas Daerah		xxxxxxxxxxx
Kas di BLUD		xxxxxxxxxxx
SALDO KAS BUD DAN BLUD		xxxxxxxxx
SALDO KAS BENDAHARA PENERIMAAN		xxxxxxxxxxx
SALDO KAS BENDAHARA PENGELUARAN		xxxxxxxxxxx
TOTAL SALDO KAS		xxxxxxxxx

Tenggarong, 2015
BUPATI,

URAIAN	CATATAN	SALDO 2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.3.4	
Arus Kas Masuk :		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) BUD Tahun Berjalan		xxxxxxxxxxx
PFK BLUD belum disetor		xxxxxxxxxxx
Titipan Pihak Ke-3 berupa SP2D Blm Dicairkan di Kasda		xxxxxxxxxxx
Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya (setelah dikurangi PFK)		xxxxxxxxxxx
Penerimaan Kembali Kesalahan Pendebetan Bank		xxxxxxxxxxx
Penerimaan yang berasal dari piutang PFK (pengembalian SP2D yang double Pencairan 2014)		xxxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxx
Arus Kas Keluar :		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) BUD Tahun Berjalan		xxxxxxxxxxx
Kas Bendahara Pengeluaran Tahun berjalan (setelah dikurangi PFK)		xxxxxxxxxxx
SP2D 2013 yang Cair di 2014 (dikurang SP2D Ganda 2014)		xxxxxxxxxxx
Pendebetan SP2D Batal dan Pendebetan Ganda		xxxxxxxxxxx
Setoran PFK BLUD		xxxxxxxxxxx
Kesalahan Bank dalam melakukan debit rekening		xxxxxxxxxxx
PFK yang telah diakui sebagai pendapatan		xxxxxxxxxxx
Dana yang berasal dari kapitasi BPJS		xxxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxx
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		xxxxxxxxx
Kenaikan / Penurunan Kas	5.3.5	xxxxxxxxxxx
Saldo Awal Kas BUD dan BLUD		xxxxxxxxxxx
Saldo Akhir Kas BUD dan BLUD	5.3.6	xxxxxxxxxxx
Terdiri dari:		
Kas di Kas Daerah		xxxxxxxxxxx
Kas di BLUD		xxxxxxxxxxx
SALDO KAS BUD DAN BLUD		xxxxxxxxx
SALDO KAS BENDAHARA PENERIMAAN		xxxxxxxxxxx
SALDO KAS BENDAHARA PENGELUARAN		xxxxxxxxxxx
TOTAL SALDO KAS		xxxxxxxxx

Tenggarong, 2015
BUPATI,



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2014



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN ARUS KAS (RESTATED)
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2014

URAIAN	CATATAN	SALDO 2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.3.1	
Arus Kas Masuk :		
Pajak Daerah		xxxxxxxxxxxx
Retribusi Daerah		xxxxxxxxxxxx
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		xxxxxxxxxxxx
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		xxxxxxxxxxxx
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		xxxxxxxxxxxx
Dana Alokasi Umum		xxxxxxxxxxxx
Dana Alokasi Khusus		xxxxxxxxxxxx
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		xxxxxxxxxxxx
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		xxxxxxxxxxxx
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		xxxxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxxx
Arus Kas Keluar :		
Belanja Pegawai		xxxxxxxxxxxx
Belanja Barang dan Jasa		xxxxxxxxxxxx
Belanja Subsidi		xxxxxxxxxxxx
Belanja Hibah		xxxxxxxxxxxx
Belanja Bantuan Sosial		xxxxxxxxxxxx
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		xxxxxxxxxxxx
Belanja Tidak Terduga		xxxxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxxx
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		xxxxxxxxxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN	5.3.2	
Arus Kas Masuk :		
Penjualan Aset Pemda yang Tidak Digunakan		xxxxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxxx
Arus Kas Keluar :		
Belanja Modal Tanah		xxxxxxxxxxxx
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		xxxxxxxxxxxx
Belanja Modal Bangunan dan Gedung		xxxxxxxxxxxx
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		xxxxxxxxxxxx
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		xxxxxxxxxxxx
Belanja Modal Aset Lainnya		xxxxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxxx
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</i>		xxxxxxxxxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.3.3	
Arus Kas Masuk :		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		xxxxxxxxxxxx
Penerimaan Piutang Daerah		xxxxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxxx
Arus Kas Keluar :		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		xxxxxxxxxxxx
Pembayaran Pokok Utang		xxxxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxxx
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</i>		xxxxxxxxxx

URAIAN	CATATAN	SALDO 2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.3.1	
Arus Kas Masuk :		
Pajak Daerah		xxxxxxxxxxxx
Retribusi Daerah		xxxxxxxxxxxx
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		xxxxxxxxxxxx
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		xxxxxxxxxxxx
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		xxxxxxxxxxxx
Dana Alokasi Umum		xxxxxxxxxxxx
Dana Alokasi Khusus		xxxxxxxxxxxx
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		xxxxxxxxxxxx
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		xxxxxxxxxxxx
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		xxxxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxxx
Arus Kas Keluar :		
Belanja Pegawai		xxxxxxxxxxxx
Belanja Barang dan Jasa		xxxxxxxxxxxx
Belanja Subsidi		xxxxxxxxxxxx
Belanja Hibah		xxxxxxxxxxxx
Belanja Bantuan Sosial		xxxxxxxxxxxx
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		xxxxxxxxxxxx
Belanja Tidak Terduga		xxxxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxxx
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		xxxxxxxxxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.3.2	
Arus Kas Masuk :		
Penjualan Aset Pemda yang Tidak Digunakan		xxxxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxxx
Arus Kas Keluar :		
Belanja Modal Tanah		xxxxxxxxxxxx
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		xxxxxxxxxxxx
Belanja Modal Bangunan dan Gedung		xxxxxxxxxxxx
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		xxxxxxxxxxxx
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		xxxxxxxxxxxx
Belanja Modal Aset Lainnya		xxxxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxxx
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</i>		xxxxxxxxxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.3.3	
Arus Kas Masuk :		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		xxxxxxxxxxxx
Penerimaan Piutang Daerah		xxxxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxxx
Arus Kas Keluar :		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		xxxxxxxxxxxx
Pembayaran Pokok Utang		xxxxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxxx
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</i>		xxxxxxxxxx

URAIAN	CATATAN	SALDO 2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN	5.3.4	
Arus Kas Masuk :		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) BUD Tahun Berjalan		xxxxxxxxxxxx
PFK BLUD belum disetor		xxxxxxxxxxxx
Titipan Pihak Ke-3 berupa SP2D Blm Dicalirkan di Kasda		xxxxxxxxxxxx
Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya (setelah dikurangi PFK)		xxxxxxxxxxxx
Penerimaan Kembali Kesalahan Pendebetan Bank		xxxxxxxxxxxx
Penerimaan yang berasal dari piutang PFK (pengembalian SP2D yang double Pencairan 2014)		xxxxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxxx
Arus Kas Keluar :		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) BUD Tahun Berjalan		xxxxxxxxxxxx
Kas Bendahara Pengeluaran Tahun berjalan (setelah dikurangi PFK)		xxxxxxxxxxxx
SP2D 2013 yang Cair di 2014 (dikurang SP2D Ganda 2014)		xxxxxxxxxxxx
Pendebetan SP2D Batal dan Pendebetan Ganda		xxxxxxxxxxxx
Setoran PFK BLUD		xxxxxxxxxxxx
Kesalahan Bank dalam melakukan debet rekening		xxxxxxxxxxxx
PFK yang telah diakui sebagai pendapatan		xxxxxxxxxxxx
Dana yang berasal dari kapitasi BPJS		xxxxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxxx
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		xxxxxxxxxx
Kenaikan / Penurunan Kas	5.3.5	xxxxxxxxxxxx
Saldo Awal Kas BUD dan BLUD		xxxxxxxxxxxx
Saldo Akhir Kas BUD dan BLUD	5.3.6	xxxxxxxxxxxx
Terdiri dari:		
Kas di Kas Daerah		xxxxxxxxxxxx
Kas di BLUD		xxxxxxxxxxxx
SALDO KAS BUD DAN BLUD		xxxxxxxxxx
SALDO KAS BENDAHARA PENERIMAAN		xxxxxxxxxxxx
SALDO KAS BENDAHARA PENGELUARAN		xxxxxxxxxxxx
TOTAL SALDO KAS		xxxxxxxxxx

Tenggarong, 2016
BUPATI,

.....

URAIAN	CATATAN	SALDO 2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.3.4	
Arus Kas Masuk :		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) BUD Tahun Berjalan		xxxxxxxxxxxx
PFK BLUD belum disetor		xxxxxxxxxxxx
Titipan Pihak Ke-3 berupa SP2D Blm Dicalirkan di Kasda		xxxxxxxxxxxx
Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya (setelah dikurangi PFK)		xxxxxxxxxxxx
Penerimaan Kembali Kesalahan Pendebetan Bank		xxxxxxxxxxxx
Penerimaan yang berasal dari piutang PFK (pengembalian SP2D yang double Pencairan 2014)		xxxxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxxx
Arus Kas Keluar :		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) BUD Tahun Berjalan		xxxxxxxxxxxx
Kas Bendahara Pengeluaran Tahun berjalan (setelah dikurangi PFK)		xxxxxxxxxxxx
SP2D 2013 yang Cair di 2014 (dikurang SP2D Ganda 2014)		xxxxxxxxxxxx
Pendebetan SP2D Batal dan Pendebetan Ganda		xxxxxxxxxxxx
Setoran PFK BLUD		xxxxxxxxxxxx
Kesalahan Bank dalam melakukan debet rekening		xxxxxxxxxxxx
PFK yang telah diakui sebagai pendapatan		xxxxxxxxxxxx
Dana yang berasal dari kapitasi BPJS		xxxxxxxxxxxx
Jumlah		xxxxxxxxxx
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		xxxxxxxxxx
Kenaikan / Penurunan Kas	5.3.5	xxxxxxxxxxxx
Saldo Awal Kas BUD dan BLUD		xxxxxxxxxxxx
Saldo Akhir Kas BUD dan BLUD	5.3.6	xxxxxxxxxxxx
Terdiri dari:		
Kas di Kas Daerah		xxxxxxxxxxxx
Kas di BLUD		xxxxxxxxxxxx
SALDO KAS BUD DAN BLUD		xxxxxxxxxx
SALDO KAS BENDAHARA PENERIMAAN		xxxxxxxxxxxx
SALDO KAS BENDAHARA PENGELUARAN		xxxxxxxxxxxx
TOTAL SALDO KAS		xxxxxxxxxx

Tenggarong, 2016
BUPATI,

.....



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN ARUS KAS (RESTATED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2014

URAIAN	CATATAN	SALDO 2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.3.1	
Arus Kas Masuk :		
Pajak Daerah		XXXXXXXXXX
Retribusi Daerah		XXXXXXXXXX
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		XXXXXXXXXX
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		XXXXXXXXXX
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		XXXXXXXXXX
Dana Alokasi Umum		XXXXXXXXXX
Dana Alokasi Khusus		XXXXXXXXXX
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah		XXXXXXXXXX
Lainnya		XXXXXXXXXX
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		XXXXXXXXXX
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah		XXXXXXXXXX
Lainnya		XXXXXXXXXX
Jumlah		XXXXXXXXXX
Arus Kas Keluar :		
Belanja Pegawai		XXXXXXXXXX
Belanja Barang dan Jasa		XXXXXXXXXX
Belanja Subsidi		XXXXXXXXXX
Belanja Hibah		XXXXXXXXXX
Belanja Bantuan Sosial		XXXXXXXXXX
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota		XXXXXXXXXX
dan Pemerintahan Desa		XXXXXXXXXX
Belanja Tidak Terduga		XXXXXXXXXX
Jumlah		XXXXXXXXXX
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		XXXXXXXXXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN	5.3.2	
Arus Kas Masuk :		
Penjualan Aset Pemda yang Tidak Digunakan		XXXXXXXXXX
Jumlah		XXXXXXXXXX
Arus Kas Keluar :		
Belanja Modal Tanah		XXXXXXXXXX
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		XXXXXXXXXX
Belanja Modal Bangunan dan Gedung		XXXXXXXXXX
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		XXXXXXXXXX
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		XXXXXXXXXX
Belanja Modal Aset Lainnya		XXXXXXXXXX
Jumlah		XXXXXXXXXX
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</i>		XXXXXXXXXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.3.3	
Arus Kas Masuk :		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		XXXXXXXXXX
Penerimaan Piutang Daerah		XXXXXXXXXX
Jumlah		XXXXXXXXXX
Arus Kas Keluar :		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		XXXXXXXXXX
Pembayaran Pokok Utang		XXXXXXXXXX
Jumlah		XXXXXXXXXX
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</i>		XXXXXXXXXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.3.4	
Arus Kas Masuk :		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BUD Tahun Berjalan		XXXXXXXXXX
PFK BLUD belum disetor		XXXXXXXXXX
Titipan Pihak Ke-3 berupa SP2D Blm Dicairkan di Kasda		XXXXXXXXXX
Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya (setelah dikurangi PFK)		XXXXXXXXXX
Penerimaan Kembali Kesalahan Pendebeban Bank		XXXXXXXXXX
Penerimaan yang berasal dari piutang PFK (pengembalian SP2D yang double Pencairan 2014)		XXXXXXXXXX
Jumlah		XXXXXXXXXX

URAIAN	CATATAN	SALDO 2014
Arus Kas Keluar :		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) BUD Tahun Berjalan		XXXXXXXXXXXX
Kas Bendahara Pengeluaran Tahun berjalan (setelah dikurangi PFK)		XXXXXXXXXXXX
SP2D 2013 yang Cair di 2014 (dikurang SP2D Ganda 2014)		XXXXXXXXXXXX
Pendebetan SP2D Batal dan Pendebetan Ganda		XXXXXXXXXXXX
Setoran PFK BLUD		XXXXXXXXXXXX
Kesalahan Bank dalam melakukan debit rekening		XXXXXXXXXXXX
PFK yang telah diakui sebagai pendapatan		XXXXXXXXXXXX
Dana yang berasal dari kapitasi BPJS		XXXXXXXXXXXX
Jumlah		XXXXXXXXXX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		XXXXXXXXXX
Kenaikan / Penurunan Kas	5.3.5	XXXXXXXXXXXX
Saldo Awal Kas BUD dan BLUD		XXXXXXXXXXXX
Saldo Akhir Kas BUD dan BLUD	5.3.6	XXXXXXXXXXXX
Terdiri dari:		
Kas di Kas Daerah		XXXXXXXXXXXX
Kas di BLUD		XXXXXXXXXXXX
SALDO KAS BUD DAN BLUD		XXXXXXXXXX
SALDO KAS BENDAHARA PENERIMAAN		XXXXXXXXXXXX
SALDO KAS BENDAHARA PENGELUARAN		XXXXXXXXXXXX
TOTAL SALDO KAS		XXXXXXXXXX

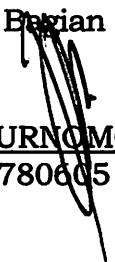
Tenggarong, 2016
BUPATI,

.....
Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

H. CHAIRIL ANWAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002